

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Kabupaten Kebumen	
Tahun Penilaian	:	2022	
Periode yang dinilai	:	RPJMD 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Tenaga Kerja	
Sumber Data	:	RPJMD 2021 - 2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	1	: Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	
		Terkelolanya Energi Baru Terbarukan	
Sasaran Strategis	1	: Berkurangnya angka pengangguran	
	2	: Mewujudkan peningkatan peranan investasi terhadap perekonomian daerah	
IKU Renstra OPD	1	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	21.52%
	2	Persentase Transmigran yang ditempatkan	20.00%
	2	Persentase Pengelolaan Energi baru terbarukan	100.00%
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	4	Program Hubungan Industrial	
	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
	6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
	7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	3.	Program Hubungan Industrial	
	4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
	5.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	

Kebumen, Agustus 2022


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISNAKER
AMIN RAHMANURASJID, S.H, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720723 199803 1 006

Penetapan Konteks Operasional OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Kebumen																																											
Tahun Penilaian	: 2022																																											
Periode yang dinilai	: RPJMD 2021-2026																																											
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi dan Sumberdaya Mineral																																											
	: Dinas Tenaga Kerja																																											
Sumber Data	: RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra Tahun 2021-2026, dan Renja 2023																																											
Sasaran Strategis	: Berkurangnya angka pengangguran																																											
	: Mewujudkan peningkatan peranan investasi terhadap perekonomian daerah																																											
Tujuan Strategis	: Meningkatkan keterserapan tenaga kerja																																											
	: Terkelolanya energi baru dan terbarukan																																											
Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>1.3</td><td>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>1.4</td><td>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr> <tr><td>2</td><td>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</td></tr> <tr><td>3</td><td>Program Penempatan Tenaga Kerja</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>4</td><td>Program Hubungan Industrial</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>5</td><td>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</td></tr> <tr><td>6</td><td>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>7</td><td>Program Perencanaan Tenaga Kerja</td></tr> <tr><td>7.1</td><td>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</td></tr> </table>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.2	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	4	Program Hubungan Industrial	4.1	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	5.1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	7.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																											
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																											
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																											
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																											
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																											
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																											
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																											
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja																																											
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																																											
2.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																																											
3	Program Penempatan Tenaga Kerja																																											
3.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																																											
3.2	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																																											
4	Program Hubungan Industrial																																											
4.1	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																																											
5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																																											
5.1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																																											
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																																											
6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																											
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja																																											
7.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																																											
Keluaran/Hasil Kegiatan	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>13 Dokumen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat</td><td>12 bulan</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun</td><td>1 Kegiatan</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang</td><td>27 Unit</td></tr> <tr><td>5</td><td>Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</td><td>12 bulan</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</td><td>126 unit</td></tr> <tr><td>7</td><td>Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi</td><td>5 paket Bidang Lattas 391 Orang UPTD BLK</td></tr> <tr><td>8</td><td>Jumlah LPKS yang dibina</td><td>60 orang</td></tr> <tr><td>9</td><td>Jumlah Tenaga Kerja yang terserap</td><td>2.312 orang</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi</td><td>2.130 orang</td></tr> <tr><td>11</td><td>Jumlah perselisihan yang terselesaikan</td><td>10 Kasus</td></tr> <tr><td>12</td><td>Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan</td><td>1 Dokumen</td></tr> <tr><td>13</td><td>Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan</td><td>10 KK</td></tr> <tr><td>14</td><td>Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat</td><td>1 Dokumen</td></tr> </table>		1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	2	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	12 bulan	3	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	1 Kegiatan	4	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang	27 Unit	5	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan	6	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	126 unit	7	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	5 paket Bidang Lattas 391 Orang UPTD BLK	8	Jumlah LPKS yang dibina	60 orang	9	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.312 orang	10	Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi	2.130 orang	11	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	10 Kasus	12	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan	1 Dokumen	13	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	10 KK	14	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	1 Dokumen
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen																																										
2	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	12 bulan																																										
3	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	1 Kegiatan																																										
4	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang	27 Unit																																										
5	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan																																										
6	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	126 unit																																										
7	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	5 paket Bidang Lattas 391 Orang UPTD BLK																																										
8	Jumlah LPKS yang dibina	60 orang																																										
9	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.312 orang																																										
10	Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi	2.130 orang																																										
11	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	10 Kasus																																										
12	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan	1 Dokumen																																										
13	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	10 KK																																										
14	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	1 Dokumen																																										
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program :</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</td></tr> <tr><td>2</td><td>Program Penempatan Tenaga Kerja</td></tr> <tr><td>3</td><td>Program Hubungan Industrial</td></tr> <tr><td>4</td><td>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</td></tr> <tr><td>5</td><td>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</td></tr> </table> <p>Kegiatan :</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kegiatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</td></tr> </table> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jumlah LPKS yang dibina</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jumlah Tenaga Kerja yang terserap</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi</td></tr> <tr><td>5</td><td>Jumlah perselisihan yang terselesaikan</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan panas bumi</td></tr> <tr><td>7</td><td>Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan</td></tr> </table>		1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	3	Program Hubungan Industrial	4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	5	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	6	Kegiatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	7	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2	Jumlah LPKS yang dibina	3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	4	Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi	5	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	6	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan panas bumi	7	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan				
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja																																											
2	Program Penempatan Tenaga Kerja																																											
3	Program Hubungan Industrial																																											
4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																																											
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																																											
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																																											
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																																											
3	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																																											
4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																																											
5	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																																											
6	Kegiatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																																											
7	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																											
1	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi																																											
2	Jumlah LPKS yang dibina																																											
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap																																											
4	Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi																																											
5	Jumlah perselisihan yang terselesaikan																																											
6	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan panas bumi																																											
7	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan																																											

Kebumen, Agustus 2022


 KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEBUMEN,
AMIN RAHMANURASJID, S.H. M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720723 199803 1 006

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Kabupaten Kebumen
 Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : RPJMD 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Keterserapan Tenaga Kerja
 Terkelolanya energi baru dan terbarukan
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
1	Sasaran : Menurunkan angka pengangguran												
	Tujuan : Meningkatkan keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja											
	Program :												
	1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan standart akreditasi	ROO.07.1 1.01	Kepala Dinas	Standart akreditasi pelatihan belum memenuhi syarat	internal	C	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
	2. Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	Pelaksanaan penempatan tenaga bersifat rutinitas	ROO.07.1 1.02	Kepala Dinas	Penempatan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri, job cavasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	4	2	13
	3. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	Lokasi transmigrasi kurang maksimal baik lahan maupun sarpras	ROO.07.1 1.03	Kepala Dinas	Lokasi bergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi	eksternal	C	Lokasi baik lahan maupun sarpras belum sesuai harapan calon transmigran	Calon Transmigran	3	2	11
	4. Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Penyelesaian Kasus memerlukan koordinasi eksternal	ROO.07.1 1.04	Kepala Dinas	Koordinasi eksternal kurang maksimal	eksternal	C	Kasus kurang cepat terselesaikan	Pekerja/buruh	3	2	11
2	Sasaran : Mewujudkan peningkatan peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto											
	Tujuan : Terkelolanya Energi Baru Terbarukan	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan											
	Program : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan	Beberapa Energi Panas Bumi belum terkaji	ROO.07.1 1.05	Kepala Dinas	belum seluruh energi panas bumi dapat dikaji	internal	C	Belum semua energi panas bumi dikaji		3	2	11

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kebumen, Agustus 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISNAKER
AMIN RAHMANURASJID, S.H. M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Kebumen
 Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : RPJMD 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja
 Terkelolanya Energi Baru Terbarukan
 Sasaran strategis OPD : Berkurangnya angka pengangguran
 : Mewujudkan peningkatan peranan investasi terhadap perekonomian daerah
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan standart akreditasi	ROO.07.1 1.01	Kepala Dinas	Standart akreditasi pelatihan belum memenuhi syarat	Internal	C	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan sarpras dan instruktur yang memenuhi syarat akreditasi	RSO.07.11.01	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	sarpras dan instruktur belum memenuhi syarat akreditasi	Internal	C	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jml orang pencari kerja yg mengikuti pelatihan	Perencanaan	Pendataan terkait calon peserta pelatihan tenaga kerja belum maksimal	RSO.07.11.01.01	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Data calon pencari kerja / pengangguran belum maksimal	Internal	C	Calon tenaga kerja yang mengikuti seleksi pelatihan kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Perencanaan	adanya refocusing anggaran	RSO.07.11.01.02	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kemampuan anggaran pemerintah daerah	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Pelaksanaan	Peserta pelatihan tidak menyelesaikan proses pelatihan	RSO.07.11.01.03	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Adanya peserta mengundurkan diri di pertengahan pelaksanaan pelatihan	Internal	C	SDM Calon tenaga kerja masih belum siap	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
				Pelaksanaan pelatihan menggunakan sarpras pelatihan belum memenuhi akreditasi	RSO.07.11.01.04	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	sarpras belum memenuhi syarat akreditasi	Internal	C	Kualitas dan kuantitas sarpras pelatihan kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
			Pelaksanaan	Banyak instruktur habis masa berlaku sertifikat metodologinya.	RSO.07.11.01.05	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Instruktur masih banyak yang belum mengikuti diklat alih jenjang dan kompetensi instruktur	Internal	C	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
			Pelaksanaan	Adanya intervensi proses seleksi peserta pelatihan	RSO.07.11.01.06	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Intervensi proses seleksi calon peserta pelatihan	Internal	C	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	1	8
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jml paket kerja sama dengan LPKS	Perencanaan	Pendataan terkait jumlah sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas belum maksimal	RSO.07.11.01.07	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Pelaporan data sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas belum maksimal	Internal	C	Kualitas dan kuantitas sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas belum terpenuhi dengan baik	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	2	13
			Perencanaan	Refocusing anggaran	RSO.07.11.01.08	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Pelaksanaan	Kondisi Sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas tidak sebanding dengan kebutuhan	RSO.07.11.01.09	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kemampuan APBD untuk mendukung sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas tidak sebanding dengan kebutuhan	Internal	C	Kualitas dan kuantitas sarpras dan instruktur LPKS dan BLK Komunitas belum terpenuhi dengan baik	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Pelaksanaan	Intervensi Proses Seleksi Pelatihan LPKS dan BLK Komunitas	RSO.07.11.01.10	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Intervensi proses seleksi calon peserta pelatihan LPKS dan BLK Komunitas	Internal	C	Kualitas Pelatihan di LPKS belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	1	8
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	Pelaksanaan	Pembinaan LPKS dan BLK Komunitas yang dilakukan belum maksimal	RSO.07.11.02	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Jumlah karyawan Dinas terbatas sehingga pembinaan LPKS dan BLK Komunitas yang dilakukan belum maksimal		C	Jumlah Pembinaan kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	1	8

	Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPKS yang terbina	Perencanaan	Refocusing anggaran	RSO.07.11.02.01	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	1	8
			Pelaksanaan	Pembinaan LPKS yang dilakukan belum maksimal	RSO.07.11.02.02	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Jumlah karyawan Dinas terbatas sehingga pembinaan LPKS yang dilakukan belum maksimal	Internal	C	Kualitas LPKS dan BLK Komunitas belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Pelaksanaan	Pembinaan BLK Komunitas yang dilakukan belum maksimal	RSO.07.11.02.03	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Jumlah karyawan Dinas terbatas sehingga pembinaan BLK Komunitas yang dilakukan belum maksimal	Internal	C	Kualitas LPKS dan BLK Komunitas belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	3	2	11
			Pelaksanaan	Intervensi Proses Seleksi pelatihan	RSO.07.11.02.04	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	belum adanya SOP seleksi calon peserta pelatihan	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja peserta pelatihan	4	1	8
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	Pelaksanaan	Pelaksanaan penempatan tenaga bersifat rutinitas	ROO.07.1 1.02	Kepala Dinas	Penempatan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri, job cavasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	4	2	13
3	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg terserap	Pelaksanaan	Pelaksanaan job cavasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penganggaran dan SDM terbatas	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	4	2	13
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jml pencari kerja yg terlayani melalui mekanisme antar kerja	Perencanaan	Banyak calon tenaga kerja tidak mengurus kartu pencari kerja	RSO.07.11.03.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi pengurusan kartu pencari kerja belum maksimal	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
				Pelaksanaan job cavasing belum maksimal	RSO.07.11.03.02	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penganggaran dan SDM terbatas	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
				Pelaksanaan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03.03	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penganggaran dan SDM terbatas	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
			Perencanaan	Refocusing Anggaran	RSO.07.11.03.04	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
			Pelaksanaan	Lulusan sekolah kompetensinya banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan kerja	RSO.07.11.03.05	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum terjalin link and match antara dunia sekolah dengan dunia kerja/dunia industri	Internal	C	Banyak lowongan kerja yang belum dapat diisi oleh pencari kerja yang ada	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
				Intervensi Proses Seleksi/ Penempatan	RSO.07.11.03.06	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses Rekrutmen belum terbuka	Internal	C	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya unit layanan disabilitas	Perencanaan	Pendataan jumlah tenaga kerja di perusahaan pemberi kerja belum maksimal	RSO.07.11.03.07	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendataan pekerja / tenaga kerja di perusahaan belum dilaksanakan secara maksimal	Internal	C	Banyak perusahaan pemberi kerja yang belum terdaftar tenaga kerja baik yang normal maupun yang difable	Pekerja dan Calon Tenaga kerja difable	3	2	11
			Perencanaan	Refocusing Anggaran	RSO.07.11.03.08	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
			Pelaksanaan	Banyak perusahaan pemberi kerja yang belum memiliki layanan bagi pekerja difable	RSO.07.11.03.09	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum maksimalnya penegakan aturan terkait quota tenaga kerja difable	Internal	C	Banyak perusahaan yang belum mencukupi quota pemakaian tenaga kerja difable	Pekerja dan Calon Tenaga kerja difable	3	2	11
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Perencanaan	Data pengangguran belum by name by adress	RSO.07.11.03.10	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendataan by name by address pengangguran belum dilaksanakan maksimal	Internal	C	Data kurang maksimal	Pekerja dan Calon Tenaga kerja difable	3	2	11
			Pelaksanaan	Pelaksanaan perluasan tenaga kerja melalui padat karya masih belum sebanding dengan jumlah pengangguran	RSO.07.11.03.11	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbatasnya anggaran sehingga banyak pengangguran yang belum dapat mengikuti program padat karya	Internal	C	Penganggaran belum mendapatkan dukungan instansi terkait padat karya	Calon Tenaga Kerja	3	2	11
4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPM/PMI Yang terlindungi	Pelaksanaan	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan belum maksimal	RSO.07.11.04	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuota dan Kurikulum pelatihan CPMI banyak belum sesuai	Internal	C	Pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan kurang maksimal	PMI/CPMI	4	2	13
	Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi	Jml Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi	Perencanaan	Pendataan CPMI dan PMI belum maksimal	RSO.07.11.04.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendataan PMI melibatkan banyak instansi	Internal dan eksternal,	C	Koordinasi lintas instansi dalam rangka pendataan	PMI/CPMI	4	2	13

			Pelaksanaan	Pelatihan CPMI belum maksimal	RSO.07.11.04.02	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbatasnya kuota pelatihan untuk CPMI	Internal	C	Masih banyak CPMI yang tidak mendapat pelatihan	PMI/CPMI	3	2	11
			Pelaksanaan	Ketidaksiadaan anggaran untuk mencukupi dengan jumlah CPMI yang ada	RSO.07.11.04.03	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Masih banyak CPMI yang tidak mendapat pelatihan	PMI/CPMI	3	2	11
			Pelaksanaan	Perlindungan PMI membutuhkan banyak koordinasi lintas sektoral	RSO.07.11.04.04	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lintas sektor memerlukan upaya koordinasi belum dilaksanakan secara maksimal	Internal dan eksternal;	C	Koordinasi lintas instansi dalam rangka perlindungan	PMI/CPMI	4	2	13
			Pelaksanaan	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan CPMI belum maksimal	RSO.07.11.04.05	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kurikulum pelatihan banyak belum sesuai dengan kebutuhan CPMI	Internal	C	Penyesuaian jenis dan kurikulum pelatihan kerja	PMI/CPMI	4	2	13
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	Pelaksanaan	Lokasi transmigrasi kurang maksimal baik lahan maupun sarpras	ROO.07.1 1.03	Kepala Dinas	Lokasi bergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi	eksternal	C	Lokasi baik lahan maupun sarpras belum sesuai harapan calon transmigran	Calon Transmigran	3	2	10
5	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	Pelaksanaan	Lokasi Transmigrasi kurang lengkap sarprasnya oleh calon transmigran	RSO.07.11.05	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lokasi bergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi	eksternal	C	Lokasi baik lahan maupun sarpras kurang diminati calon transmigran	Calon Transmigran	3	2	11
	Sub Kegiatan Fasilitasi perpindahan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	Perencanaan	Refocusing Anggaran	RSO.07.11.05.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan anggaran Pemerintah Daerah	Internal	C	Pendataan terkait pencari kerja belum maksimal	Calon Transmigran	3	2	11
			Pelaksanaan	Lokasi Transmigrasi masih belum lengkap sarprasnya	RSO.07.11.05.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lokasi bergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi	eksternal	C	Lokasi transmigran belum memenuhi syarat	Calon Transmigran	3	2	11
			Pelaksanaan	Adanya intervensi proses seleksi /penempatan	RSO.07.11.05.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses Rekrutmen dan penempatan transmigrasi kurang terbuka luas	Internal	C	Banyak masyarakat yang kurang tersosialisasikan	Calon Transmigran	3	2	11
			Pelaksanaan	Potensi Terjadinya Gratifikasi seleksi dan penempatan	RSO.07.11.05.01	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Potensi kurangnya Integritas Pegawai	Internal	C	Seleksi dan Penempatan kurang transparan dan akuntable	Calon Transmigran	3	2	11
	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Pelaksanaan	Penyelesaian Kasus memerlukan koordinasi eksternal	ROO.07.1 1.04	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Koordinasi eksternal kurang maksimal	eksternal	C	Kasus kurang cepat terselesaikan	Pekerja/buruh	3	2	11
6	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	Pelaksanaan	Kasus dan Peraturan ketenagakerjaan cepat berubah dan berganti	RSO.07.11.06	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kebijakan dan kasus terlalu sering berubah dan berganti akibat Pandemi Covid 19	eksternal	C	Ketaatan Perusahaan menurun	Pekerja/buruh	3	2	11
	Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di satu daerah	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	Perencanaan	Data Perusahaan dan Tenaga Kerja sangat dinamis	RSO.07.11.06.01	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Dinamika perusahaan dan tenaga kerja akibat Pandemi Covid 19	Internal	C	Validasi dan up to date data kurang	Pekerja/buruh	3	2	11
			Pelaksanaan	Kasus ketenagakerjaan selalu berubah karakteristiknya	RSO.07.11.06.02	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	kasus ketenagakerjaan dinamis akibat Pandemi Covid 19	Internal	C	Kasus kurang cepat terselesaikan	Pekerja/buruh	3	2	11
			Pelaksanaan	Peraturan ketenagakerjaan cepat berubah dan berganti	RSO.07.11.06.03	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Kebijakan terlalu sering berubah dan berganti	Internal	C	Ketaatan Perusahaan menurun	Pekerja/buruh	3	2	11
	Program Pengelolaan Energi baru terbarukan	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	ROO.07.1 1.05	Pelaksanaan	belum seluruh energi panas bumi dapat dikaji	Internal	C	Belum semua energi panas bumi dikaji	Masyarakat sekitar	3	2	11
6	Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan	Pelaksanaan	Beberapa Energi Panas Bumi belum terkaji	RSO.07.11.07	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	belum seluruh energi panas bumi dapat dikaji	Internal	C	Belum semua energi panas bumi dikaji	Masyarakat sekitar	3	2	11

	Sub Kegiatan PPengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan	Pelaksanaan	Beberapa Energi Panas Bumi belum terkaji	RSO.07.11.07.01	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	belum seluruh energi panas bumi dapat dikaji	Internal	C	Belum semua energi panas bumi dikaji	Masyarakat sekitar	3	2	11
--	--	---	-------------	--	-----------------	--	--	----------	---	--------------------------------------	--------------------	---	---	----

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kebumen, Agustus 2022



Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Kabupaten Kebumen			
Tahun Penilaian		: 2022			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya keterserapan tenaga kerja			
Urusan Pemerintahan		: Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja					
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan standart akreditasi	ROO.07.1 1.01	4	2	13
2	Pelaksanaan penempatan tenaga bersifat rutinitas	ROO.07.1 1.02	4	2	13
3	Lokasi transmigrasi kurang maksimal baik lahan maupun sarpras	ROO.07.1 1.03	3	2	11
4	Penyelesaian Kasus memerlukan koordinasi eksternal	ROO.07.1 1.04	3	2	11
5	Pengelolaan Energi baru terbarukan	ROO.07.1 1.05	3	2	11
III Risiko Operasional Dinas Tenaga Kerja					
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan sarpras dan instruktur yang memenuhi	RSO.07.11.01	4	2	13
2	Pembinaan LPKS dan BLK Komunitas yang dilakukan belum maksimal	RSO.07.11.02	4	1	8
3	Pelaksanaan job canvasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03	4	2	13
4	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan	RSO.07.11.04	4	2	13
5	Lokasi Transmigrasi kurang lengkap sarprasnya oleh calon transmigran	RSO.07.11.05	3	2	11
6	Kasus dan Peraturan ketenagakerjaan cepat berubah dan berganti	RSO.07.11.06	3	2	11
7	Beberapa Energi Panas Bumi belum terakaji	RSO.07.11.07	3	2	11

Kebumen, Agustus 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISNAKER
AMIN RAHMANURASJID, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 3a dan 3b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 3a dan 3b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Kabupaten Kebumen				
Tahun Penilaian		: 2022				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya keterserapan tenaga kerja				
Urusan Pemerintahan		: Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja						
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan standart akreditasi	ROO.07.1 1.01	13	Kepala Dinas	Standart akreditasi pelatihan belum memenuhi syarat	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal
2	Pelaksanaan penempatan tenaga bersifat rutinitas	ROO.07.1 1.02	13	Kepala Dinas	Penempatan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri, job cavasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal
III Risiko Operasional Dinas Tenaga Kerja						
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan sarpras dan instruktur yang memenuhi syarat akreditasi	RSO.07.11.01	13	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industri	sarpras dan instruktur belum memenuhi syarat akreditasi	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal
2	Pelaksanaan job canvasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03	13	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penganggaran dan SDM terbatas	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal
3	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan belum maksimal	RSO.07.11.04	13	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuota dan Kurikulum pelatihan CPML banyak belum sesuai	Pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan kurang maksimal

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Kebumen, Agustus 2022


**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,**
DISNAKER
AMIN RAHMANURASJID, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720723 199803 1 006

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja							
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan standart akreditasi	ROO.07.1 1.01	Meningkatkan sarpras dan kapasitas SDM Instruktur dengan menggunakan APBD	Peningkatan sarpras dan kapasitas SDM Instruktur dengan menggunakan APBD Provinsi dan APBN	Mengusulkan bantuan sarpras melalui APBD/APBN dan peningkatan kapasitas instruktur ke Disnakertrans Prov Jateng dan KemNaker	Kepala Dinas	Triwulan IV 2022
2	Pelaksanaan penempatan tenaga bersifat rutinitas	ROO.07.1 1.02	Melaksanakan inovasi kegiatan penempatan tenaga kerja	Melaksanakan Job Canvasing, Bursa Kerja berbasis elektronik dan Job Fair lebih luas dengan pelibatan Disnakertrans Prov Jateng dan KemNaker	Melaksanakan Job Canvasing, Bursa Kerja berbasis elektronik dan Job Fair lebih luas dan dengan inovasi	Kepala Dinas	Triwulan IV 2022
III Risiko Operasional Dinas Tenaga Kerja							
1	Pelaksanaan pelatihan belum menggunakan sarpras dan instruktur yang memenuhi syarat akreditasi	RSO.07.11.01	Meningkatkan sarpras dan kapasitas SDM Instruktur dengan menggunakan APBD	Peningkatan sarpras dan kapasitas SDM Instruktur dengan menggunakan APBD Provinsi dan APBN	Mengusulkan bantuan sarpras melalui APBD/APBN dan peningkatan kapasitas instruktur ke Disnakertrans Prov Jateng dan KemNaker	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industri	Triwulan IV 2022
2	Pelaksanaan job canvasing, bursa kerja dan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03	Melaksanakan inovasi kegiatan penempatan tenaga kerja	Melaksanakan Job Canvasing, Bursa Kerja berbasis elektronik dan Job Fair lebih luas dengan pelibatan Disnakertrans Prov Jateng dan	Melaksanakan Job Canvasing, Bursa Kerja berbasis elektronik dan Job Fair lebih luas dan dengan inovasi	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Triwulan IV 2022
3	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi Internasional yang dibutuhkan belum maksimal	RSO.07.11.04	Pelatihan caregiver atau merawat orang tua jompo	Melaksanakan pelatihan baru untuk kebutuhan kerja luar negeri	Pelatihan Baby sitter, CAREGIVER, bahasa Jepang dan Inggris	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Triwulan IV 2022

Kebumen, Agustus 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISNAKER
AMIN RAHMANURASJID, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Tabel. 7.1 . Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Capaian 2020	Perkiraan capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indikator tujuan :									
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	5,80	5,51-5,58	5,40-5,50	5,30-5,40	5,20-5,30	5,10-5,20	5,10-5,20
	Indikator Sasaran (IKU Urusan Tenaga Kerja:									
	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	%	15,76	18,11	21,52	23,40	25,32	27,43	28,75	28,75
	b. Ketimpangan Pendapatan	%	20,02	20,45	20,50	21,00	21,00-21,50	21,50-22,00	22,00	22,00
	Indikator Sasaran (IKU Urusan Transmigrasi):	%								
	Persentase Transmigran yang ditempatkan	%	0	0	20	20	20	20	20	100
2	Indikator Tujuan:									
	Indikator Sasaran (IKU Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral)									
	Persentase Pengelolaan Energi baru terbarukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kebumen, Agustus 2022



KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURASJID, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19720723 199803 1 006

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun
Sering Terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80%)	Dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 Tahun
Kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 Tahun
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 Tahun
Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Dapat terjadi < 2 dalam 1 Tahun

1. Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, tidak ada sanksi

3. Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tingkat Risiko